

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Kajian Tentang Pariwisata

2.1.1.1 Pengertian Pariwisata

Menurut (Wahab, 2003), Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu Negara itu sendiri/ diluar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.

Konsep Pariwisata juga dikemukakan oleh (Suwena, 2017), dimana ia mengemukakan hal yang tidak berbeda dengan Wahab. Menurutnya Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.

Selanjutnya Lundberg dalam (Ghani, 2014) mengemukakan, Pariwisata adalah suatu konsep umum yang sejarahnya balik ke tahun 1811, atau sebelumnya, dan definisinya terus berubah. Istilah kepariwisataan mencakup orang-orang yang melakukan perjalanan pergi dari rumahnya dan perusahaan-perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (3), disebutkan Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan wisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Berdasarkan pendapat ahli dan Pengertian dalam Undang-Undang Pariwisata maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Konsep Pariwisata mengandung esensi adanya orang yang melakukan perjalanan yang dikenal dengan wisatawan, adanya orang yang mengorganisir perjalanan, memberikan pelayanan dan menyediakan sesuatu yang diinginkan oleh wisatawan.

2.1.1.2 Jenis Pariwisata

Menurut Cooper et al (2020), jenis-jenis pariwisata yaitu

1. Pariwisata Alam

Pariwisata Alam yang memanfaatkan keindahan alam sebagai daya tarik utama.

Contohnya: Gunung, pantai, danau, hutan, taman nasional dan Ekowisata

2. Pariwisata Budaya

Pariwisata Budaya yang berkaitan dengan warisan budaya, sejarah, adat istiadat, dan seni. Contohnya: Situs sejarah, candi, keraton, Upacara adat dan pertunjukan seni tradisional

3. Pariwisata Buatan

Pariwisata Buatan yang dibangun dan dikembangkan manusia sebagai tempat rekreasi. Contohnya Taman hiburan, wahana permainan, waterpark, Mall bertema, studio film wisata

4. Pariwisata Minat Khusus

Pariwisata Minat Khusus yang memerlukan minat dan aktivitas khusus, seperti: Wisata petualangan (rafting, mendaki) dan Wisata kuliner, wisata religi, wisata olahraga

5. Pariwisata Edukasi

Pariwisata Edukasi yang bertujuan memberikan pengalaman belajar. Contohnya: Wisata pertanian, museum, planetarium

Menurut (Nyoman, 2002), pariwisata dapat dibedakan menurut motif wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Jenis-jenis pariwisata tersebut adalah sebagai berikut

1. Pariwisata Budaya

Pariwisata budaya yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni mereka. Seiring perjalanan serupa ini di satukan dengan kesempatan-kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan budaya, seperti eksposisi seni (seni tari, seni drama, seni musik, dan seni suara), atau kegiatan yang bermotif kesejarahan dan sebagainya.

2. Pariwisata Maritim atau Bahari

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga di air, lebih- lebih di danau, pantai, teluk, atau laut seperti memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan mendayung, melihat-lihat taman laut dengan pemandangan indah di bawah permukaan air serta berbagai rekreasi perairan yang banyak dilakukan di daerah-daerah atau negara-negara maritim, di Laut Karibia, Hawaii, Tahiji, Fiji dan sebagainya. Di Indonesia banyak tempat dan daerah yang memiliki potensi wisata maritim ini, seperti misalnya pulau-pulau Seribu di Teluk Jakarta, Danau Toba, pantai Pulau Bali dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, taman laut di Kepulauan Maluku dan sebagainya. Jenis ini disebut pulau wisata tirta.

3. Pariwisata Cagar Alam (Taman Konservasi)

Untuk jenis wisata ini biasanya banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang. Wisata cagar alam ini banyak dilakukan oleh para penggemar dan pecinta alam dalam kaitannya dengan kegemaran memotret binatang atau marga satwa serta pepohonan kembang beraneka warna yang memang mendapat perlindungan dari pemerintah dan masyarakat.

4. Pariwisata Pertanian (Agrowisata)

Sebagai halnya wisata industri, wisata pertanian ini adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek - proyek pertanian, perkebunan, ladang

pembibitan dan sebagainya dimakna wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun melihat-lihat keliling sambil menikmati segarnya tanaman beraneka warna dan suburnya pembibitan berbagai jenis sayur-mayur dan palawijanya di sekitar perkebunan yang dikunjungi

5. Pariwisata Olahraga

Pariwisata yang dilakukan dalam rangka olahraga, seperti bepergian dalam rangka perwakilan negara dalam pertandingan olahraga antar negara.

6. Pariwisata Sosial

Adalah kegiatan wisata yang diperuntukkan bagi kelas menengah ke bawah.

Kegiatan wisata ini biasanya di sponsori oleh lembaga-lembaga tertentu.

2.1.1.3 Komponen Pariwisata

Terdapat 3 (tiga) komponen yang harus dimiliki oleh sebuah destinasi wisata yang lebih dikenal dengan istilah Unsur 3A.

Yang tercakup dalam unsur 3A tersebut ialah: *attraction* (atraksi), *accessibility* (aksesibilitas), dan *amenity* (amenitas).

1. Atraksi

Dalam istilah kepariwisataan, atraksi adalah beberapa daya tarik yang ada di sebuah destinasi wisata. Daya tarik wisata sendiri adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan (UU RI Tentang Kepariwisata No. 10 Tahun 2009).

Atraksi yang dimaksud dapat berbentuk atraksi budaya, atraksi alam, event, rekreasi dan atraksi hiburan (Unnafi, 2022).

2. Aksesibilitas

Aksesibilitas berhubungan dengan segala hal yang berkaitan dengan akses wisatawan ketika hendak berkunjung seperti penyediaan sarana dan prasarana transportasi umum baik udara, laut maupun darat yang dapat mempermudah wisatawan untuk menjangkau lokasi destinasi. Penyediaan akses informasi ini dapat dimuat dalam blog atau media sosial lainnya dengan menyertakan informasi detail tentang destinasi wisata termasuk daya tarik, akomodasi, fasilitas publik dan pariwisata serta informasi lainnya yang di butuhkan oleh wisatawan.

3. Amenity

Amenitas (*amenity*) yaitu yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung kegiatan wisata di destinasi yang meliputi : tempat penginapan, warung/rumah makan, toko cinderamata, penukaran uang asing, agen perjalanan, pusat informasi wisata, dan fasilitas kenyamanan lainnya (Hariawan et al., 2020).

2.1.2. Kajian Tentang Desa Wisata

2.1.2.1 Pengertian Desa Wisata

Desa wisata merupakan konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang semakin mendapat perhatian dari masyarakat dan pemerintah. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (2021), desa wisata adalah wilayah administratif yang menawarkan daya tarik wisata—baik alam, budaya, maupun buatan yang dikelola oleh masyarakat dan menjadi bagian dari sistem pariwisata berkelanjutan. Definisi ini menekankan pentingnya partisipasi komunitas serta keberlanjutan sebagai pilar utama. Menurut Suansri

(2020) menyebut desa wisata sebagai kegiatan pariwisata yang memanfaatkan kehidupan dan budaya masyarakat pedesaan sebagai daya tarik utama, dengan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaannya. Hal ini memperkuat gagasan bahwa masyarakat bukan hanya objek, melainkan subjek dari pembangunan pariwisata itu sendiri.

Menurut Nugroho dan Dahuri (2022) memandang desa wisata sebagai model pembangunan wilayah berbasis komunitas yang mengintegrasikan potensi alam, kearifan lokal, dan nilai budaya. Tujuannya tidak semata-mata untuk menarik wisatawan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Damanik (2021) juga menegaskan bahwa desa wisata merupakan desa yang secara sadar mengembangkan atraksi wisata lokal dengan dukungan infrastruktur, pelayanan, dan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan pengalaman otentik bagi wisatawan. Menurut World Tourism Organization (UNWTO, 2021), desa wisata adalah wilayah pedesaan yang menawarkan pengalaman wisata berbasis sumber daya alam dan budaya, dengan menekankan partisipasi masyarakat lokal, pelestarian tradisi, dan prinsip keberlanjutan.

Berdasarkan pendapat ahli, maka disimpulkan desa wisata bukan sekadar destinasi, melainkan ekosistem pariwisata berbasis komunitas yang memadukan potensi lokal dengan strategi pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

2.1.2.2 Syarat-Syarat Desa Wisata

Menurut (Priasukmana, 2001), Penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut :

1. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
2. Memiliki daya tarik menarik berupa alam, seni budaya, legenda makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya.
4. Keamanan di desa tersebut terjamin.
5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
6. Beriklim sejuk atau dingin.
7. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas

Nuryanti (1993) mengungkapkan “desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku”. Unsur-unsur dari desa wisata adalah memiliki potensi wisata, seni, dan budaya khas setempat, aksesibilitas dan infrastruktur mendukung program desa wisata, terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan. Pijakan dasar dalam pengembangan desa wisata adalah pemahaman terhadap karakter dan kemampuan unsur-unsur yang ada dalam desa, antara lain: lingkungan alam, sosial ekonomi, budaya masyarakat, arsitektur, struktur tata ruang dan aspek historis, termasuk

indigeneus knowledge (pengetahuan dan kemampuan lokal) yang dimiliki oleh masyarakat.

Menurut (Priasukmana, 2001) Untuk menjadikan suatu kawasan wisata menjadi desa wisata yang berhasil haruslah memperhatikan faktor sebagai berikut

1. Faktor kelangkaan, yakni sifat daya tarik wisata yang tidak dapat dijumpai di tempat lain.
2. Faktor kealamiahan, yakni sifat daya tarik wisata yang belum tersentuh oleh perubahan akibat perilaku manusia.
3. Faktor keunikan, yakni sifat daya tarik wisata yang memiliki keunggulan komparatif dibandingkan obyek lain.
4. Faktor pemberdayaan masyarakat. Faktor ini menghimbau agar masyarakat lokal benar-benar dilibatkan dan diberdayakan dalam perencanaan dan pengembangan obyek wisata yang ada di daerahnya.
5. Faktor optimalisasi lahan, maksudnya adalah lahan yang dipakai sebagai kawasan wisata dipergunakan berdasarkan pertimbangan optimalisasi sesuai dengan mekanisme pasar.
6. Faktor pemerataan, harus diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung khususnya bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata serta memberikan kesempatan yang sama kepada individu sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan sinergis antara masyarakat setempat dengan pengelola kawasan wisata.

2.1.2.3 Kategori Desa Wisata

Tujuan dari adanya pengembangan desa wisata adalah untuk melestarikan suatu kondisi lingkungan dan memacu terjadinya pertumbuhan ekonomi lokal di suatu daerah sehingga melalui konsep desa wisata ini dapat menjadi salah satu bentuk pariwisata yang ramah lingkungan di masa depan. Berdasarkan tingkat perkembangannya, desa wisata dibagi menjadi tiga kategori (Salah Wahab, 2003) yaitu:

1. Desa Wisata Embrio

Desa yang mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata dan sudah mulai ada gerakan masyarakat/desa untuk mengelolanya menjadi desa wisata.

2. Desa Wisata Berkembang

Desa wisata embrio yang sudah dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, sudah ada swadaya masyarakat/desa untuk pengelolaannya, sudah mulai melaksanakan promosi dan sudah ada wisatawan yang mulai tertarik untuk berkunjung.

3. Desa Wisata Maju

Desa wisata yang sudah berkembang dengan adanya kunjungan wisatawan secara kontinu dan dikelola secara professional dengan terbentuknya forum pengelola, seperti Koperasi/Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), selanjutnya disebut BUMdes, serta sudah mampu melakukan promosi dan pemasaran dengan baik.

2.1.3. Kajian Tentang Pariwisata Berkelanjutan

2.1.3.1 Pengertian Pariwisata Berkelanjutan

Menurut (Hadiwijoyo, 2012) pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang pembangunannya disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, mampu memberi kesempatan bekerja untuk generasi muda sehingga dapat dikembangkan berdasarkan tatanan sosial yang telah ada sebelumnya.

Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan adalah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Pasal 6: Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata, Pasal 8: 1). Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. 2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pasal 11: Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan Dalam hal memajukan pariwisata, dilakukan konsep pengembangan Desa Wisata.

2.1.3.2 Prinsip-Prinsip Pariwisata Berkelanjutan

Mengacu pada konsep perencanaan pengembangan desa wisata dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (2001), maka pola pengembangan desa wisata berkelanjutan diharapkan memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat

Suatu desa yang tata cara dan ada istiadatnya masih mendominasi pola kehidupan masyarakatnya, dalam pengembangannya sebagai atraksi wisata harus disesuaikan dengan tata cara yang berlaku di desanya.

2. Pembangunan fisik untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa

Pengembangan pariwisata di suatu desa pada hakekatnya tidak merubah apa yang sudah ada di desa tersebut, tetapi lebih kepada upaya merubah apa yang ada di desa dan kemudian mengemasnya sedemikian rupa sehingga menarik untuk dijadikan atraksi wisata. Pembangunan fisik yang dilakukan dalam rangka pengembangan desa seperti penambahan sarana jalan setapak, penyediaan MCK, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lebih ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang ada sehingga desa tersebut dapat dikunjungi dan dinikmati wisatawan.

3. Memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian

Arsitektur bangunan, pola lanskap serta material yang digunakan dalam pembangunan haruslah menonjolkan ciri khas desa, mencerminkan kelokalan dan keaslian wilayah setempat.

4. Memberdayakan masyarakat desa wisata

Unsur penting dalam pengembangan desa wisata adalah keterlibatan masyarakat desa dalam setiap aspek wisata yang ada di desa tersebut. Pengembangan desa wisata sebagai pengejawantahan dari konsep Pariwisata Inti Rakyat mengandung arti bahwa masyarakat desa memperoleh manfaat sebesar-besarnya dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan yang hasilnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat diluar aktifitas mereka sehari-hari.

5. Memperhatikan daya dukung dan berwawasan lingkungan

Prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan harus mendasari pengembangan desa wisata. Pengembangan yang melampaui daya dukung akan menimbulkan dampak yang besar tidak hanya pada lingkungan alam tetapi juga pada kehidupan sosial budaya masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi daya tarik desa tersebut. Beberapa bentuk keterlibatan masyarakat tersebut adalah penyediaan fasilitas akomodasi berupa rumah-rumah penduduk (home stay), penyediaan kebutuhan konsumsi wisatawan, pemandu wisata, penyediaan transportasi lokal, pertunjukan kesenian, dan lain-lain (Priasukmana, 2001).

2.1.3.3 Komponen Pariwisata Berkelanjutan

Secara garis besar, komponen pengembangan pariwisata dapat diklarifikasikan menjadi beberapa point seperti yang di kemukakan oleh (Wahab, 2003) yaitu:

1. Atraksi dan aktivitas pariwisata

Semua atraksi baik yang bersifat alami, maupun khusus serta berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kawasan yang menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.

2. Akomodasi

Hotel dan fasilitas lain yang sejenis, serta jasa layanannya dimana wisatawan menginap selama waktu kunjungannya.

3. Fasilitas dan jasa layanan wisata lainnya

Fasilitas-fasilitas dan jasa pelayanan yang diperlukan untuk pengembangan pariwisata, antara lain meliputi: operasional tour and travel, restoran dan kafe, bank dan money changer, kantor informasi pariwisata, fasilitas keamanan, dan sebagainya.

4. Fasilitas dan jasa layanan transportasi

Fasilitas dan jasa layanan transportasi meliputi kemudahan akses transportasi masuk ke kota dan area pengembangan, sistem transportasi internal penghubung lokasi wisata dan area pengembangannya, transportasi dalam area pengembangan.

5. Infrastruktur lainnya, seperti air, listrik dan telekomunikasi.

6. Elemen institusional, elemen ini penting untuk mengatur dan mengembangkan pariwisata. Elemen institusional antara lain berupa program perencanaan, pendidikan, dan pelatihan SDM, promosi, dan pemasaran strategis, kebijakan investasi, program pengendalian pengaruh ekonomi, lingkungan dan sosial kultural.

Sementara Menurut (Suwanto, 2004), unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya meliputi 5 unsur:

1. Desa Wisata dan daya tarik wisata
2. Prasarana wisata
3. Sarana wisata.
4. Tata laksana/infrastruktur.
5. Masyarakat/lingkungan

2.1.4. Kajian Tentang Pentahelix

2.1.4.1 Pengertian Pentahelix

Model *Penta Helix* didasarkan pada lima jenis pemangku kepentingan diantaranya adalah akademisi, komunitas, bisnis (ekonomi), pemerintah dan media. Model ini sangat berguna untuk masalah daerah pemangku kepentingan yang mana setiap stakeholder mewakili berbagai kepentingan daerahnya masing-masing. *Penta Helix* merupakan perluasan dari strategi tiga helix dengan melibatkan berbagai elemen lembaga masyarakat atau non-profit dalam rangka mewujudkan inovasi. Melalui kerjasama sinergis diharapkan untuk mewujudkan sebuah inovasi yang didukung oleh berbagai sumber daya yang berinteraksi secara sinergis.

Menurut (Purwanto, 2017) Model Penta Helix merupakan pendekatan kolaboratif lintas sektor yang mencakup lima unsur utama, yaitu akademisi, pelaku bisnis, pemerintah, komunitas, dan media. Kolaborasi ini dianggap penting untuk menciptakan inovasi dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan ekonomi

secara bersama-sama. Dalam pandangan ini, setiap elemen memiliki peran strategis dalam mendukung proses pembangunan dan perumusan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut (Savitri, 2016) bahwa Model Penta Helix digunakan sebagai pendekatan dalam pengembangan kebijakan publik yang menekankan pentingnya sinergi antar lima elemen kunci. Model ini diyakini mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan inovatif, dengan melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dan kompetensi dalam proses kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan efektif.

Menurut (Akhmad Fauzi, 2019) Model Penta Helix merupakan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada inovasi, dengan melibatkan lima aktor penting: akademisi, bisnis, pemerintah, masyarakat, dan media. Sinergi antara kelima elemen ini sangat krusial dalam menghasilkan solusi yang komprehensif terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Fauzi menekankan bahwa kolaborasi semacam ini diperlukan untuk menciptakan inovasi yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan zaman. Menurut (Hendrawan Dwi Putranto, 2020) Model Penta Helix merupakan kerangka kerja pembangunan berbasis inovasi terbuka yang menyatukan seluruh aktor utama dalam masyarakat. Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada kerja sama formal, tetapi juga menuntut keterlibatan aktif dari semua pihak dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan atau program pembangunan. Dengan demikian, model ini mampu menciptakan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.2 Komponen Penthahelix

Menurut (Luturlean, 2009) lima komponen dari *Penta Helix* tersebut memiliki kontribusi yang saling berkaitan diantaranya:

1. Pemerintah (*government*) adalah salah satu *stakeholders* yang memiliki regulasi dan reponsibility dalam mengembangkan pariwisata. Sebagai pemangku kebijakan, pemerintah memiliki tugas:
 - a. Menyusun dan menetapkan regulasi, kebijakan, serta perizinan terkait pengembangan pariwisata.
 - b. Menyediakan infrastruktur dasar (transportasi, keamanan, fasilitas umum) yang mendukung destinasi pariwisata.
 - c. Mendorong kerja sama lintas sektor serta memberikan insentif atau subsidi untuk pengembangan kawasan wisata.
 - d. Melakukan pengawasan terhadap praktik pariwisata agar sesuai dengan prinsip berkelanjutan dan budaya lokal.
2. Swasta (*business*) adalah suatu entitas yang memiliki aktivitas dalam mengolah barang atau jasa untuk menjadi berharga. Sebagai pelaku ekonomi, sektor swasta bertugas:
 - a. Menyediakan produk dan layanan wisata seperti hotel, restoran, transportasi, dan paket wisata.
 - b. Melakukan investasi untuk pengembangan destinasi dan promosi pariwisata.
 - c. Menerapkan inovasi dalam pelayanan dan teknologi guna meningkatkan daya saing industri pariwisata.

- d. Menjalin kemitraan dengan pemerintah, masyarakat, dan akademisi untuk mengembangkan wisata berkelanjutan.
3. Masyarakat (*community*) adalah orang-orang yang memiliki minat yang sama dan relevan dengan masalah atau kasus yang berkembang. Sebagai pihak yang tinggal di atau dekat destinasi wisata, masyarakat memiliki tugas:
- a. Terlibat aktif dalam pelestarian budaya dan lingkungan lokal sebagai daya tarik wisata.
 - b. Mendukung dan/atau menjalankan usaha ekonomi lokal berbasis wisata (homestay, kerajinan tangan, kuliner).
 - c. Menjaga sikap ramah terhadap wisatawan dan menjadi duta budaya lokal.
 - d. Berpartisipasi dalam forum atau pelatihan yang mendukung kesiapan masyarakat menghadapi wisatawan.
4. Media (*media*) adalah pemangku kepentingan yang memiliki informasi lebih untuk mengembangkan pariwisata dan memainkan peran yang kuat dalam mempromosikan pariwisata. Sebagai penyampai informasi dan promosi, media bertugas
- a. Menyebarluaskan informasi mengenai destinasi wisata melalui berbagai kanal (TV, media cetak, media sosial, portal wisata).
 - b. Membangun citra positif destinasi wisata untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.
 - c. Memberikan edukasi publik mengenai pentingnya wisata berkelanjutan.
 - d. Menjadi penghubung antara pelaku wisata dan publik melalui liputan atau kampanye kreatif.

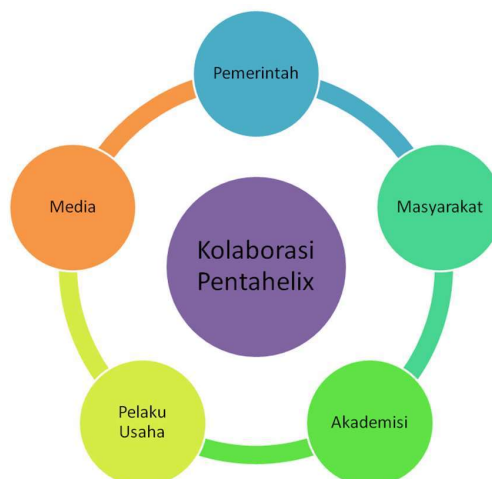
5. Akademisi (*academics*) adalah sumber daya pengetahuan. Mereka memiliki konsep, teori dalam mengembangkan pariwisata untuk mendapatkan keuntungan kompetitif yang berkelanjutan. Sebagai penghasil pengetahuan dan riset, akademisi memiliki tugas:

- a. Melakukan penelitian untuk pengembangan model pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.
- b. Memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi pengembangan wisata kepada pemerintah dan pelaku usaha.
- c. Menyusun kurikulum dan program pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM pariwisata.
- d. Menjadi fasilitator dialog lintas sektor dalam forum ilmiah maupun forum kebijakan pariwisata.

Model Penta Helix dapat dikatakan bahwa sebuah model yang dirancang khusus untuk mendukung pengembangan sebuah inovasi baru yang sedang atau yang telah berlangsung agar mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga Penta Helix dirasa cukup perlu untuk mendukung sebuah perkembangan inovasi baik dibidang budaya, pariwisata, ekonomi dan lain sebagainya.

Di Indonesia, Pentahelix diperkenalkan pertama kali oleh Menteri Pariwisata periode tahun 2014-2019 yaitu Arif Yahya, yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan. Dalam peraturan ini dituliskan bahwa dorongan sistem kepariwisataan diperlukan melalui optimalnya peran *Academician*

(Akademisi), *Business* (Bisnis), *Community* (Komunitas), *Government* (Pemerintahan), dan Media (Publikasi) atau biasa disingkat menjadi ABCGM agar dapat terintegrasi dengan baik dan menciptakan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, serta pengalaman, dan nilai manfaat kepariwisataan agar dapat memberikan keuntungan dan manfaat pada lingkungan dan masyarakat. Aktor-aktor yang memiliki peranan penting dalam pengembangan pariwisata khususnya di budaya Basiacuong yang ada di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Konsep pentahelix memiliki rumus ABCGM yaitu *Academician*, *Business*, *Community*, *Government*, dan Media.



Gambar 2.1 Konsep Teori Pentahelix

2.1.4.3 Faktor-faktor Memengaruhi Model PentaHelix

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi Model Penta Helix dalam pembangunan atau inovasi kolaboratif dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek kunci yang berkaitan dengan masing-masing unsur helix

(akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, dan media), serta hubungan antar-aktor (Carayannis dan Campbell, 2009). Berikut ini adalah uraian faktor-faktor tersebut:

1. Komunikasi dan Koordinasi Antar unsur
2. Komitmen dan Partisipasi Aktif Setiap Unsur
3. Kapasitas dan Sumber Daya
4. Dukungan Kebijakan dan Regulasi
5. Kepercayaan dan Nilai Bersama
6. Ketersediaan Infrastruktur dan Teknologi
7. Peran Media sebagai Katalisator Informasi
8. Kearifan Lokal dan Kesiapan Sosial Budaya

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

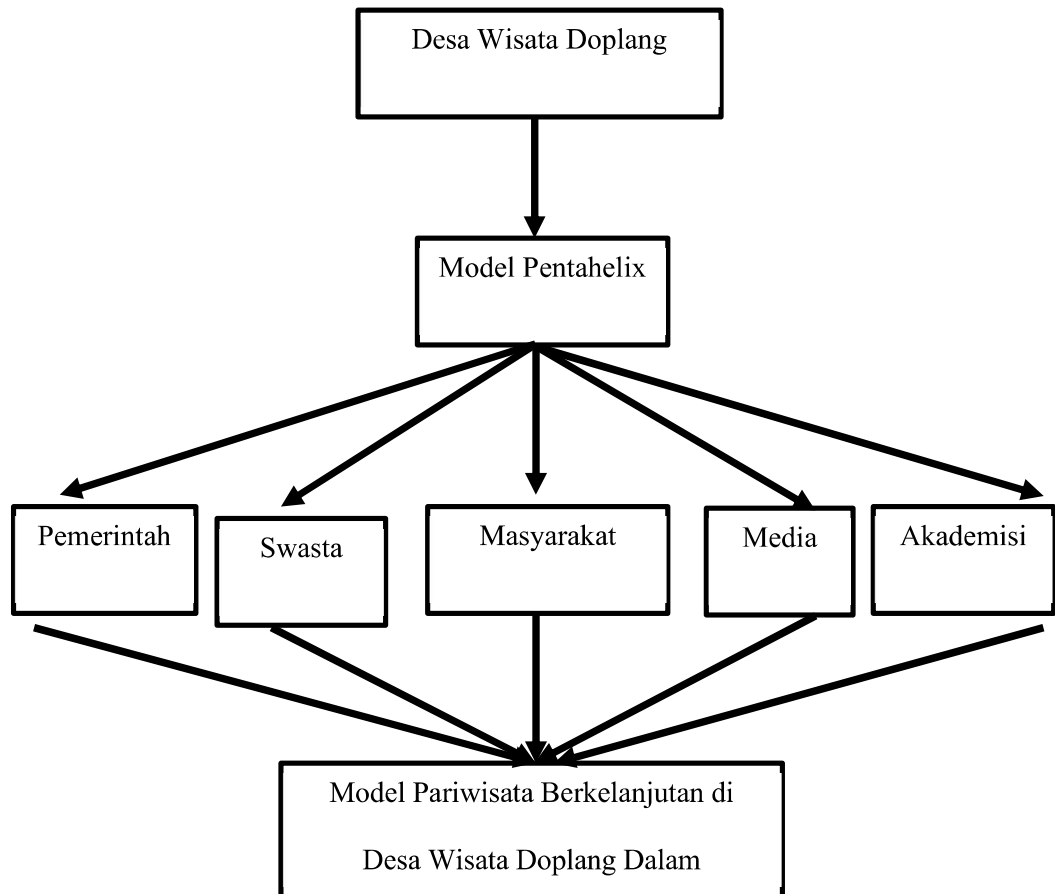
No	Nama Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	“Maturbongs, 2020” “Kolaborasi Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Merauke”	Kualitatif	<i>This research carried out by using the literature study (library research). Local wisdom based tourism with collaboration between actors in the pentahelix model, supports to prioritize all forms of uniqueness that grow and develop in society, as well as providing agricultural values, which use both material and non-material.</i>
2	“Rosardi, 2020” “Model Pentahelix Dalam Pengembangan	Kualitatif	Pariwisata Berkelanjutan bahwa untuk menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat

	Pariwisata Berkelanjutan Di Kabupaten Batang, Jawa Tengah”		kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan. Agrowisata Perkebunan The PT. Pagilaran memiliki peran besar dalam pembangunan nasional. Model Pentahelix untuk Pengembangan Pariwisata berkelanjutan dengan role model yaitu Agrowisata Perkebunan Teh PT. Pagilaran harus memiliki kepedulian pada lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan pelestarian budaya. Pengelolaan Agrowisata berpedoman pada Sustainable Tourism. Dalam hal social networking, PT. Pagilaran yang dimiliki oleh UGM selaku pemilik Agrowisata Perkebunan Teh tentu menjalin hubungan dengan berbagai pihak yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, lembaga usaha dan sekolah.
3	“Raras Gistha Rosardi, 2020” “Model Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Kabupaten Batang, Jawa Tengah”	Kualitatif	Hasil penelitian yaitu Model Pentahelix untuk Pengembangan Pariwisata berkelanjutan dengan role model yaitu Agrowisata Perkebunan Teh PT. Pagilaran harus memiliki kepedulian pada lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan pelestarian budaya. Pengelolaan Agrowisata berpedoman pada Sustainable Tourism. Dalam hal social networking, PT. Pagilaran yang dimiliki oleh UGM selaku pemilik Agrowisata Perkebunan Teh tentu menjalin hubungan dengan berbagai pihak, yaitu: Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, lembaga usaha dan sekolah.
4	“Huda et al., 2022” “Pengembangan Sadar Wisata Melalui Strategi Pentahelix Bagi Masyarakat	Kualitatif	Eksistensi destinasi wisata tidak terlepas dari adanya peran pentahelix dalam pembangunan desa wisata. Diharapkan dengan meningkatnya peran actor pentahelix dapat meningkatkan pengembangan desa wisatanya. Semakin tinggi peran aktor pentahelix (pemerintah,

	Desa Wonosalam, Jombang”		akademisi, pebisnis, media masa, dan masyarakat) dalam pembangunan desa maka semakin besar pula peluang desa menjadi desa wisata maju dan berkembang.
5	<p>“Alfan Hakim, 2022”</p> <p>“Strategi Pentahelix pada Perencanaan Pariwisata di Desa Hegarmukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat”</p>	Kualitatif	<p><i>This study found the role for each stakeholders are: the academics focus on tourism planning based on current theories, the government focuses on policymakers in developing tourism potential, business people is as a nail in creating added value and maintaining surrounding economic growth, and the role of the community is to help manage tourism potential and the role of the media is to promote and help to inform the wider community about the tourism potential that exists in the village. As the result of all the analysis from stakeholders, there are 3 focussed strategies for Desa Wisata Hegarmukti, in term of developing tourist attraction through culture and nature, and also infrascuturure and facility development.</i></p>
6	<p>“Maulana, 2022”</p> <p>“Model Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Perlang Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung”</p>	Kualitatif	<p>Hasil penelitian yaitu Model Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Perlang sudah berjalan dengan optimal. Hal ini karena kolaborasi antar informan sudah berjalan dengan baik serta peran masing – masing aktor telah direalisasikan dengan optimal.</p>
7	<p>“Nur Husni Emilson et al., 2023”</p> <p>“Analisis Pengembangan Desa Wisata Berbasis Penta Helix di Desa Jambu Kabupaten Kediri”</p>	Kualitatif	<p>Hasil penelitian ini hanya terdapat empat aktor berupa akademisi, komunitas, media, dan pemerintah yang berperan dalam pengembangan Agro Petik Kelengkengsaldana. Kesimpulan pada penelitian ini adalah aktor Penta Helix tidak berjalan optimal karena tidak terdapat peran dari aktor bisnis. Saran</p>

			<p>penelitian adalah melakukan program CSR, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Jambu, membentuk tim media publikasi, dan melibatkan aktor Pemerintah untuk melakukan pelatihan publikasi media sosial.</p>
8	<p>“Yesayabela et al., 2024”</p> <p>“Kolaborasi Model Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Pandean Kecamatan Gondang Kabupaten Trenggalek”</p>	Kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima pemangku kepentingan masing-masing sudah berperan sesuai bidangnya dalam pengembangan Desa Wisata Pandean, namun kerjasama antara para pemangku kepentingan masih belum optimal. Temuan penelitian ini merekomendasikan bahwa peran Pemerintah Desa perlu ditingkatkan dengan mengembangkan kebijakan yang meningkatkan inovasi dalam penggunaan sumber daya alam lokal, dan melembagakan kolaborasi pemangku kepentingan untuk memastikan kolaborasi yang berkelanjutan.</p>

2.3. Kerangka Berpikir



Gambar 2.2 Kerangka Pikir Teoritis